



Judul : Investasi Harus Mengarah ke Padat Karya
Tanggal : Senin, 08 Februari 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 10

Investasi Harus Mengarah ke Padat Karya

BADAN Koordinasi Pananaman Modal (BKPM) disarankan mengarahkan investasi yang masuk ke daerah agar menjadi investasi yang bersifat padat karya serta tersebar merata di seluruh wilayah di Tanah Air.

“Agar investasi di daerah mengarah ke padat karya. Arah dari investasi ini jangan yang menguras sumber daya alam Indonesia,” kata anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Selain itu, investasi yang masuk harus dapat dilakukan secara merata ke seluruh Indonesia, dengan proporsi seimbang antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Ia juga menginginkan BKPM memperkuat instrumen investasi di daerah sehingga perkembangan ekonomi di daerah semakin progresif dan signifikan.

Hal yang dapat dilakukan dengan peran BKPM guna mempercepat geliat perekonomian di daerah, lanjutnya, di antaranya adanya dana alokasi khusus (DAK) untuk peningkatan kapasitas dan sosialisasi terkait perizinan dan OSS (*online single submission*).

Selanjutnya, penambahan anggaran pengawasan pelaksanaan penanaman modal di provinsi untuk peningkatan realisasi investasi. Hal itu sekaligus membantu daerah menyiapkan studi kelayakan terkait dengan sektor unggulan potensi investasi di daerah.

Nevi juga menyarankan agar UMKM dapat diberi porsi yang lebih daripada sebelumnya dalam bidang investasi di daerah. Pasalnya, pelaksanaan investasi harus sejalan dengan upaya pengembangan UMKM.

Ia mengingatkan, UMKM merupakan kekuatan ekonomi rakyat dan menjadi kontributor sebesar 61,1% bagi PDB nasional pada 2018.

Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut realisasi investasi pada 2020 mencapai Rp826 triliun atau 101,1% dari target realisasi investasi sebesar Rp817 triliun, se usai dilakukan revisi dari target awal Rp886 triliun karena adanya pandemi covid-19.

“Alhamdulillah, dalam tahun berjalan, realisasi investasi kita mencapai Rp826 triliun atau naik 101,1%,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (3/2). (Try/Ant/E-2)